

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2016)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

JOKO SANTOSO

B200 140 326

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2016)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

JOKO SANTOSO

B200 140 326

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Shinta Permana S., SE,MM

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

Yang ditulis oleh:

JOKO SANTOSO

B200140326

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 07 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Shinta Permata Sari, SE, MM
(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Erma Setiawati, M.M., Akt.
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Drs Eko S., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, M.M)
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Agustus 2018
Penulis



JOKO SANTOSO

B200140326

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DAPER), Danabelanja modal, Ukuran pemerintah daerah (UPD), dan Kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 105 Kabupaten/Kota. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (DAPER) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel belanja modal, ukuran pemerintah daerah (UPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dan Kemandirian keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of local revenue, equity funds, capital expenditure, size of local government and financial performance of local governments to regional autonomy at district / municipal governments in Central Java province 2014 – 2016. This research uses purposive sampling method. This research uses 105 regency / municipal samples. The data of this study uses secondary data obtained from the report the audit results of the Republic of Indonesia's finance agency on the budget realization report of the district / city APBD in Central Java Province 2014 – 2016. Analysis using classical assumption test and then in hypothesis test with multiple linear regression with coefficient of determination test, F test, and t test. The result of the study show that the variables of regional income and balance funds affect the level of regional independence. Meanwhile, variabel of capital expenditure, size of local government and financial performance of local government have no effect to the level of regional independence.

Keywords : local generated revenue, balance funds, capital expenditure, local government size, local government financial performance and regional financial independence.

1. PENDAHULUAN

Dikeluarkannya Undang – Undang No.32 tahun 2004 kemudian diperbaharui menjadi Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, menjadi langkah awal dalam memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan Sulianti dan Ika (2012)

Berkaitan dengan kewajiban tersebut maka pemerintah daerah diharuskan dapat mengelola potensi yang dimiliki daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal (Sulianti, 2012). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.64 tahun 2013 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersil. Keraguan masyarakat ini dapat diatasi dengan adanya pengukuran kinerja (Sesotyaningtyas, 2012).

Diberlakukannya paket Undang – Undang otonomi daerah dan keuangan negara tersebut tentunya memiliki tujuan yaitu agar terciptanya suatu kemandirian daerah. Menurut Hadi (2010) kemandirian daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. diadakanya otonomi daerah diharapkan masing – masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing – masing. Begitu pula

dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing – masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat ditinjau dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh setiap pemerintah kabupaten / pemerintah kota. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten / pemerintah kota tersebut dikatakan mandiri (Muliana, 2009).

Pencapaian realisasi atas anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh realisasi penerimaan daerah, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD) (Junarwati, dkk 2013). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan kekayaan riil dari masing – masing daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah (Masdiantini dan Erawati, 2016). Kesesuaian waktu dan efektifitas penerimaan dan pengeluaran akan berpengaruh tingkat realitas belanja. Oleh karena itu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang dapat dikontrol oleh pemerintah daerah, maka realisasi belanja akan dipengaruhi oleh realisasi pendapatan asli daerah (PAD) (Abdullah, 2013 dalam penelitian Junarwati dkk, 2013).

Namun dalam implementasinya, otonomi daerah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah adanya dispartis (kesenjangan) fiskal antar daerah. salah satu hal yang menjadi solusinya adalah dana perimbangan, yakni sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program – program pemerintah daerah (Nam, 2001 dalam Maiyora, 2015). Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diteapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Budianto dan Alexander, 2016).

Kemakmuran pemerintah daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai yang positif akan mendorong adanya investasi dan secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur suatu daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi disuatu daerah akan meningkatkan pendapatan

asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal juga mengurangi total utang kepada pihak luar (Simanullang, 2013).

Muhayanah (2016) dalam penelitiannya menjelaskan belanja modal merupakan bentuk investasi yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin banyaknya infrastruktur dalam pemerintah daerah bisa dicerminkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pemerintah daerah serta akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Sudarsana dan Raharja (2013) menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Dalam rangka mengungkapkan dan upaya menjalankan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya kewenangan fiskal, suatu daerah harus mampu dan dapat mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri (Muhayanah, 2016). Menurut Maiyora (2015) ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang di iringi dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Kusumawardani (2012) menjelaskan ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK-RI serta dapat diakses, dan Laporan Keuangan pemerintah daerah tersebut ditampilkan secara lengkap untuk tahun anggaran 2014-2016.

2.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.2.1 Variabel Dependen

Menurut Halim (2008:232) Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian daerah ini sebagai cerminan suatu pemerintah daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Halim (2001:263) Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila semakin kecil tingkat ketergantungannya.

2.2.2 Variabel independen

Simanullang (2013) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha – usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007 dalam Simanullang, 2013). Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak.

2.2.4 Belanja Modal

Andira dkk (2016) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan belanja modal lainnya.

2.2.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Proksi dalam variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total aset. Total aset dapat diperoleh dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada bagian neraca daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010), peneliti menggunakan total aktiva dalam mengukur ukuran. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil dari pada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Wuryaningsih, 2002 dalam sari, 2016).

2.2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Simanullang (2013) konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	95192,79	1201581,78	235816,7606	166192,79306
DAPER	105	403863,97	1562967,74	959353,6366	250947,55112
BM	105	51980,73	800181,23	257161,4070	130194,95907
UPD	105	1450840,89	23210940,49	3175314,2337	2648735,3672
KKPD	105	0,00	0,90	0,0885	0,09902
KD		8,75	36,35		5,42666

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan table 1 di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh nilai minimum sebesar Rp 95192,79 Juta, nilai maksimum sebesar Rp 1.201.581,78 Juta, nilai rata-rata sebesar Rp 235816,7606 Juta dan nilai standar

deviasi sebesar Rp 166192,79306 Juta. Variabel dana perimbangan (DAPER) diperoleh nilai minimum sebesar Rp 403863,97 Juta, nilai maksimum sebesar Rp 1562967,74 Juta, nilai rata-rata sebesar Rp 959353,6366 Juta, dan nilai standar deviasi sebesar Rp 250947,55112 Juta. Variabel belanja modal diperoleh nilai minimum sebesar Rp 51980,73 Juta, nilai maksimum sebesar Rp 800181,23 Juta, nilai rata-rata sebesar Rp 257161,4070 Juta, dan nilai standar deviasi sebesar Rp 130194,95907 Juta. Variabel ukuran pemerintah daerah (UPD) diperoleh nilai minimum sebesar Rp 1450840,89 Juta, nilai maksimum sebesar Rp 23210940,49 Juta, nilai rata-rata sebesar Rp 3175314,2337 Juta, dan nilai standar deviasi sebesar Rp 2648735,3672 Juta. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) diperoleh nilai minimum Rp 0,00, nilai maksimum sebesar Rp 0,90 Juta, nilai rata-rata Rp 0,0885 Juta, dan nilai standar deviasi Rp 0,09902 Juta. Variabel kemandirian daerah diperoleh nilai minimum sebesar Rp 8,75 Juta, nilai maksimum sebesar Rp 36,35 Juta, nilai rata-rata sebesar Rp 0, dan nilai standar deviasi sebesar Rp 5,4266 Juta

3.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,622	> 0,05	Distribusi data normal

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

3.3 Uji Autokorelasi

Tabel 3

Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Ketentuan	Kesimpulan
1,939	$DU < DW < 4-DU$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,939 sedangkan nilai DU dan DL memiliki nilai sebesar 1,7827 dan 1,5837. Nilai tersebut berada pada ketentuan $DU < DW < 4-DU$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

3.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	0,234	4,282	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana Perimbangan	0,594	1,684	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	0,319	3,134	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Pemerintah Daerah	0,316	3,162	Tidak terjadi multikolinearitas
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,984	1,016	Tidak Terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	0,732	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0,095	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,908	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Pemerintah Daerah	0,517	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,103	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.6 Uji Hipotesis

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	β	Thitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,934	25,297	0,000	
Pendapatan asli daerah	-5,759E-007	10,940	0,000	H1 diterima
Dana Perimbangan	-1,173E-006	-12,598	0,000	H2 diterima
Belanja Modal	2,123E-007	-,664	0,508	H3 ditolak
Ukuran Pemerintah Daerah	5,879E-008	-230	0,819	H4 ditolak
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-2,254	-814	0,417	H5 ditolak
R^2		0,834		
<i>Adjusted R²</i>		0,826		
Fhitung		99,578		
Sig		0,000		

Sumber :Data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{KKD} = 2,934 - 5,759\text{E-}007\text{PAD} - 1,173\text{E-}006\text{DAPER} + 2,123\text{E-}007\text{BM} + 5,879\text{E-}008\text{UPD} - 2,254\text{KKPD} + \varepsilon$$

Interprestasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 2,934. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DAPER), belanja modal, ukuran pemerintah daerah (UPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) dianggap konstan maka besarnya kemandirian keuangan daerah sebesar 2,934.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -5,759E-007. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap pendapatan

asli daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.

3. Koefisien regresi dana perimbangan (DAPER) sebesar $-1,173E-006$. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap dana perimbangan maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap dana perimbangan maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.
4. Koefisien regresi belanja modal sebesar $2,123E-007$. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap belanja modal maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap belanja modal maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.
5. Koefisien regresi ukuran pemerintah daerah (UPD) sebesar $5,879E-008$. Tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap ukuran pemerintah daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap ukuran pemerintah daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.
6. Koefisien regresi kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) sebesar $-2,254$. Tanda negatif dapat diartikan apabila terjadi penurunan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah, sebaliknya jika terdapat tanda positif dapat diartikan apabila terjadi peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kemandirian keuangan daerah.

3.7 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

3.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel pendapatan asli daerah diperoleh thitung sebesar 10,940 > ttabel sebesar 1,98304 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. Pemerintah daerah didalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta daerah yang mandiri.

Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur'ainy, dkk (2013) dan Susanti, dkk (2016) yang membuktikan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

3.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel ukuran pemerintah daerah diperoleh thitung sebesar $-230 < t_{tabel}$ sebesar $-1,98304$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,819 > \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besarpun ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Ukuran yang besar dalam pemerintah juga tidak akan menjamin dan memberikan kemudahan kegiatan operasional didalam memberikan pelayanan masyarakat yang akan datang pula.

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lesmana (2010) yang membuktikan tidak adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kemandirian daerah.

3.7.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh thitung sebesar $-814 < t_{tabel}$ sebesar $-1,98304$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,417 > \text{batas signifikansi}$ $0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah terbukti secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besarpun kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Ukuran yang besar dalam pemerintah juga tidak akan menjamin dan memberikan kemudahan kegiatan operasional didalam memberikan pelayanan masyarakat yang akan datang pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian mahmud dan rompas (2014) yang membuktikan tidak adanya pengaruh ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kemandirian daerah.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2016. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$. (2) Dana perimbangan terbukti berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,000 < \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$. (3) Belanja modal terbukti tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,508 > \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$. (4) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,819 > \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$. (5) Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,417 > \text{batas signifikansi sebesar } 0,05$.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Berikut merupakan penjelasan mengenai keterbatasan yang dihadapi. (1) Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan informasi tertulis tentang LKPD pada tahun 2014-2016. (2) Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk menganalisis pengaruh-pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. (3) Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi LKPD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini menjadikan

hasil penelitian ini tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari kemandirian keuangan daerah dan pada akhirnya tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu penelitian yang kredibel.

4.3 Saran

Berdasarkan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya, yaitu : (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat tidak hanya menggunakan data statistik dan informasi tertulis tentang LKPD saja, namun bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kemandirian keuangan daerah dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. (2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dalam penelitian dan untuk menggunakan variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi LKPD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antaraa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Dana Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa- Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah*. Jurnal Kritis. Universitas Satya Wacana. Salatiga.
- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. 2015. “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. ISSN. 2460-0784.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Ernawati. 2017. “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. ISSN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6, No. 2, 2460-0585.

- Erstelita. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol: 3 No.1 Januari 2010.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikasari, Putri. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)". *Artikel*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Imawan, Riswanda, dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, dkk. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara". *ISSN*. Universitas Halu Oleo Kendari. Vol. 1, No. 2, 2502-5171.
- Marizka, Reza. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Machmud, M., G. Kawung, dan W . Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.

- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Puspitasari, A. F. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 1 No. 2 : 1-22
- Nur'ainy, Renny dkk. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)". *ISSN*. Universitas Gunadarma Jakarta. Vol. 5, 1858-2559.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Putri dan Sjadili. 2013. "Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2006-2010)".
- Susanti, dkk. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)". *ISSN*. Universitas Telkom Bandung. Vol. 3, No. 3, 2355-9357.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik, Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sulianti dan Ika, Siti Rochmah. 2012. "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra, Vol. 3, No.2 Hal 123-138
- www.djpk.depkeu.go.id (diakses 17 Desember 2017 pukul 17:00 WIB)